



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

NOMOR: 06 /HK.01.01/K.KN-02/06/2022

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengoptimalkan Layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Daftar Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147).
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17).
 3. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :0075 /K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Daftar Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam **Diktum KESATU** Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu terdiri atas:
1. Informasi yang ditetapkan sebagai Informasi yang Dikecualikan Klasifikasinya sebagai berikut yaitu :
 - a. Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
 - b. Informasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu yang dikecualikan
 - c. Daftar Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang dikecualikan
 - d. Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi yang dikecualikan
 - e. Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc yang dikecualikan
 - f. Informasi Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan yang dikecualikan
 - g. Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan yang dikecualikan
 - h. Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan yang dikecualikan
 - i. Informasi Memorandum Atau Surat-Surat Antar Badan Publik Atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan yang dikecualikan
 - j. Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang dikecualikan

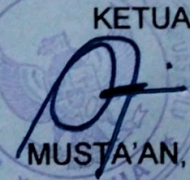
- k. Informasi Dokumentasi Formulir Model C1-Kwk Plano yang dikecualikan
- l. Informasi Dokumentasi Formulir Model C.Hasil-Kwk yang dikecualikan

- 2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan Secara Berkala;
- 3. Informasi yang wajib diumumkan Secara Serta Merta;
- 4. Informasi yang wajib disediakan Tersedia Setiap Saat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu ini disampaikan kepada :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
- 2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat
- 3. Yang bersangkutan;
- 4. Arsip.

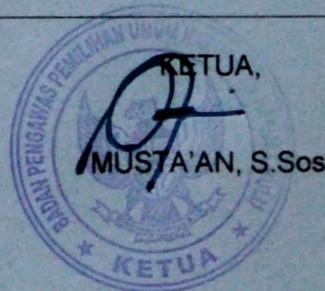
Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 06 Juni 2022

KETUA,

MUSTA'AN, S.Sos



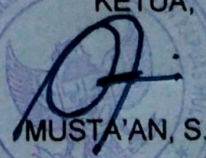
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 06 /HK.01.01/K.KN-02/06/2022
TANGGAL : 06 JUNI 2022
KLASIFIKASI : INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2 Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4 Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajain Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir A.11 Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12 Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 – Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 – Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 – Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 – Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 – Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 – Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis , Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota



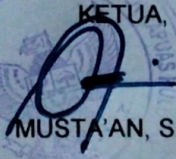
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KAPUAS HULU
 NOMOR : 06 /HK.01.01/K.KN-02/06/2022
 TANGGAL : 06 JUNI 2022
 KLASIFIKASI : INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	INFORMASI PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILU YANG DIKECUALIKAN
1.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model B2. Temuan
3.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
5.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
6.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
7.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
8.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
9.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
10.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
11.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
12.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
13.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
14.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-undangan Pemilu
15.	Formulir Model B16. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/Bawaslu Provinsi
16.	Formulir Model B17. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

KETUA,

 MUSTA'AN, S.Sos
 KETUA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
HULU
NOMOR : 06 /HK.01.01/K.KN-02/06/2022
TANGGAL : 06 JUNI 2022
KLASIFIKASI : INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

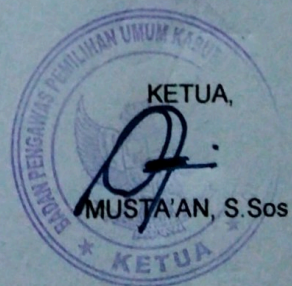
NO	DAFTAR INFORMASI DUGAAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM YANG DIKECUALIKAN
1.	Cek List Laporan/Temuan Dugaan Tindak Pidana Pemilu
2.	Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu (Sg1)
3.	Laporan Hasil Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Pemilu
4.	Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
5.	Penerusan Pelanggaran Pidana Pemilu Ke Penyidikan
6.	Daftar Saksi dan/atau Ahli
7.	Daftar Tersangka
8.	Daftar Bareang Bukti
9.	Laporan Polisi
10.	Tanda Bukti Laporan
11.	Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
12.	Pengembalian Berkas Penuntut Ke Penyidik
13.	Pemberitahuan Berkas Lengkap Dari Penyidik Ke Penuntut

KETUA,

MUSTA'AN, S.Sos



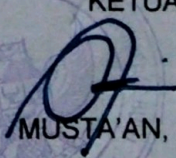
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
HULU
NOMOR : 06 /HK.01.01/K.KN-02/06/2022
TANGGAL : 06 JUNI 2022
KLASIFIKASI : INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	ALAT KERJA PENGAWASAN SEBAGAI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
1.	ALAT KERJA PENGAWASAN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
 HULU
 NOMOR : 66 /HK.01.01/K.KN-02/06/2022
 TANGGAL : 06 JUNI 2022
 KLASIFIKASI : INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	INFORMASI SELEKSI PENGAWAS PEMILU/PEMILIHAN AD HOC YANG DIKECUALIKAN
1.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
2.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
3.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
4.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

KETUA,

 MUSTA'AN, S.Sos

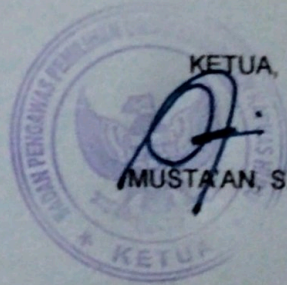


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAPUAS HULU
NOMOR : 06 /HK.01.01/K.KN-02/06/2022
TANGGAL : 06 JUNI 2022
KLASIFIKASI : INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	INFORMASI PENANGANAN PERKARA HUKUM DI PENGADILAN YANG DIKECUALIKAN
1.	Jawaban Atas Gugatan
2.	Duplik Atas Replik
3.	Kesimpulan
4.	Memori Banding
5.	Kontra Memori Banding
6.	Memori Kasasi
7.	Kontra Memori Kasasi
8.	Keterangan Tertulis

KETUA,

MUSTIKAN, S. Sos



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAPUAS HULU
NOMOR : 06 /HK.01.01/K.KN-02/06/2022
TANGGAL : 06 JUNI 2022
KLASIFIKASI : INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	INFORMASI PENGAWASAN PEMILU/PEMILIHAN YANG DIKECUALIKAN
1.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
2.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

KETUA,

MUSTA'AN, S.Sos



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAPUAS HULU
NOMOR : 06 /HK.01.01/K.KN-02/06/2022
TANGGAL : 06 JUNI 2022
KLASIFIKASI : INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

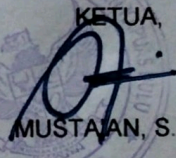
NO	INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN YANG DIKECUALIKAN	JANGKA WAKTU
1.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait	Hingga putusan dibacakan
2.	Formulir model PSP-15 berita acaramusyawarah	Hingga putusan dibacakan
3.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan	Hingga putusan dibacakan
4.	Formulir model PSP-21 berita acaramusyawarah penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan	Hingga putusan dibacakan
5.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan	Hingga putusan dibacakan
6.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan	Hingga putusan dibacakan
7.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan	Hingga putusan dibacakan
8.	SK penetapan panitia musyawarah	Hingga putusan dibacakan
9.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
10.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
11.	Alat bukti tertulis	Hingga putusan dibacakan

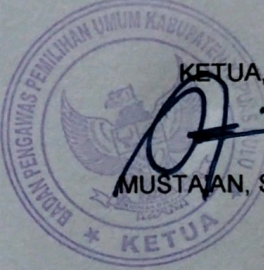
KETUA,

MUSTA'AN, S. Sos

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAPUAS HULU
NOMOR : 06 /HK.01.01/K.KN-02/06/2022
TANGGAL : 06 JUNI 2022
KLASIFIKASI : INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	INFORMASI MEMORANDUM ATAU SURAT-SURAT ANTAR BADAN PUBLIK ATAU INTRA BADAN PUBLIK YANG MENURUT SIFATNYA DIRAHASIAKAN YANG DIKECUALIKAN	JANGKA WAKTU
1.	Memorandum atau Surat-Surat Antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang Menurut Sifatnya dirahasiakan	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

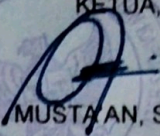
KETUA,

MUSTA'AN, S. Sos



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAPUAS HULU
NOMOR : 06 /HK.01.01/K.KN-02/06/2022
TANGGAL : 06 JUNI 2022
KLASIFIKASI : INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

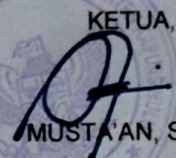
NO	INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YANG DIKECUALIKAN	JANGKA WAKTU
1.	Formulir Model A.1 Laporan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
2.	Formulir Model A.2	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
3.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
4.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
5.	Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
6.	Formulir Model A.4.1 Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
7.	Formulir Model A.5 Pelimpahan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
8.	Formulir Model A.6 Informasi Awal Laporan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
9.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
10.	Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
11.	Formulir Model A.8 Keterangan / Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
12.	Formulir Model A.9 Keterangan / Klarifikasi dibawah Sumpah / Janji	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
13.	Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
14.	Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
15.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
16.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
17.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilihan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)

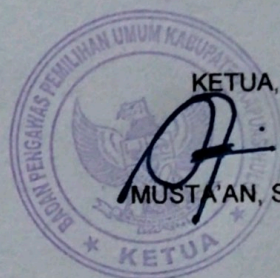
18.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan Lainnya	30 Tahun(Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
19.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan / Temuan	30 Tahun(Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)


 KETUA,

 MUSTAFAN, S. Sos

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAPUAS HULU
NOMOR : 06 /HK.01.01/K.KN-02/06/2022
TANGGAL : 06 JUNI 2022
KLASIFIKASI : INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

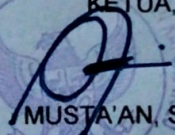
NO	INFORMASI DOKUMENTASI FORMULIR MODEL C1-KWK PLANO YANG DIKECUALIKAN	JANGKA WAKTU	KETERANGAN
1.	Dokumentasi Formulir Model C1- KWK Plano	Hingga Penetapan Pasangan Calon Terpilih	Dalam Hal Terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan, Jangka Waktu Pengecualian Hingga Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

KETUA,

MUSTIKAN, S.Sos



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAPUAS HULU
NOMOR : 06 /HK.01.01/K.KN-02/06/2022
TANGGAL : 06 JUNI 2022
KLASIFIKASI : INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	INFORMASI DOKUMENTASI FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK YANG DIKECUALIKAN	JANGKA WAKTU	KETERANGAN
1.	Dokumentasi Formulir Model C. Hasil KWK	Hingga Penetapan Pasangan Calon Terpilih	Dalam Hal Terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan, Jangka Waktu Pengecualian Hingga Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

KETUA,

MUSTA'AN, S.Sos

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor : 06 /HK.01.01/K KN-02/06/2022
Tanggal : 06 JUNI 2022

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2022**

No.	Judul Informasi	Pejabat yang menguasai/ Menyimpan Informasi	Waktu Pembuatan	Format Yang Ada		Keterangan
				Cetak	Online	
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA						
Informasi yang berkaitan dengan profil Bawaslu						
1	Profil Singkat Komisioner	Kesekretariatan	Tahun 2022	√	√	
2	Struktur Organisasi	Kesekretariatan	Tahun 2022	√	√	
3	Tugas, Wewenang dan Kewajiban	Kesekretariatan	Tahun 2022	√	√	
4	Visi dan Misi	Kesekretariatan	Tahun 2022	√	√	
5	Alamat Lengkap	Kesekretariatan	Tahun 2022	√	√	
Informasi Mengenai Keuangan LHKPN						
6	LHKPN Komisioner Tahun 2020	Kesekretariatan	Tahun 2020	√	√	

7	LHKPN Komisioner Tahun 2021	Kesekretariatan	Tahun 2021	√	√	
8	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun 2019	Kesekretariatan	Tahun 2019	√	√	
9	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun 2020	Kesekretariatan	Tahun 2020	√	√	
10	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun 2021	Kesekretariatan	Tahun 2021	√	√	
11	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Badan Publik	Data dan Informasi	Tahun 2022	√	√	
Informasi Mengenai Kegiatan dan Kinerja						
12	Kalender Kegiatan	SDM dan Organisasi	Tahun 2021	√	√	
13	Program Kerja Bawaslu Tahun 2021	SDM dan Organisasi	Tahun 2021	√	√	
14	Program Kerja Bawaslu Tahun 2022	SDM dan Organisasi	Tahun 2022	√	√	
15	Laporan Kinerja Badan Publik tahun 2019	SDM dan Organisasi	Tahun 2019	√	√	
16	Laporan Kinerja Badan Publik tahun 2020	SDM dan Organisasi	Tahun 2020	√	√	
17	Laporan Kinerja Badan Publik tahun 2021	SDM dan Organisasi	Tahun 2021	√	√	
18	Infomasi Rencana Kerja Badan Publik PPID tentang Pembahasan SAQ	Data dan Informasi	Tahun 2022	√	√	
19	Rapat Pembahasan Perbawaslu dan Perki Keterbukaan Informasi Publik	Data dan Informasi	Tahun 2022	√	√	
20	Rapat Pembuatan dan Maintenance Website PPID	Data dan Informasi	Tahun 2022	√	√	
21	Rapat Uji Kosekuensi Atas Informasi Publik yang Dikecualikan	Data dan Informasi	Tahun 2022	√	√	
Informasi Mengenai Pelayanan Informasi Publik						
22	Jumlah permohonan informasi publik yang diterima tahun 2019	Data dan Informasi	Tahun 2019	√	√	

23	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya tahun 2019	Data dan Informasi	Tahun 2019	√	√	
24	Jumlah permohonan informasi publik yang diterima tahun 2020	Data dan Informasi	Tahun 2020	√	√	
25	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya tahun 2020	Data dan Informasi	Tahun 2020	√	√	
26	Jumlah permohonan informasi publik yang diterima tahun 2019	Data dan Informasi	Tahun 2019	√	√	
27	Jumlah permohonan informasi publik yang diterima tahun 2020	Data dan Informasi	Tahun 2020	√	√	
28	Jumlah permohonan informasi publik yang diterima tahun 2021	Data dan Informasi	Tahun 2021	√	√	
29	Laporan Kepuasan Layanan Informasi Publik Tahun 2019 – 2021	Data dan Informasi	Tahun 2021	√	√	
30	Informasi Dokumen pendukung dalam penyusunan peraturan, keputusan, kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan	Pengawasan	Tahun 2022	√	√	
31	Informasi Pemilu dan Pemilihan lain yang diatur dalam undang-undangan	Pengawasan	Tahun 2022	√	√	
32	Informasi Peraturan, Keputusan, Kebijakan, yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu dan	Pengawasan	Tahun 2022	√	√	
33	Daftar Informasi khusus Pemilu dan Pemilihan lain	Pengawasan	Tahun 2022	√	√	
Informasi Mengenai Peraturan dan/atau Kebijakan						
34	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu	Hukum	Tahun 2022	√	√	
35	Undang-undang	Hukum	Tahun 2022	√	√	
36	Peraturan Bawaslu	Hukum	Tahun 2022	√	√	

37	Keputusan Bawaslu	Hukum	Tahun 2022	√	√	
38	Peraturan Komisi Informasi	Hukum	Tahun 2022	√	√	
Informasi Mengenai Kepemiluan						
Tahapan, Program dan Jadwal yang berkaitan dengan Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan atas Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan						
39	Rakernis Pengawasan Tahapan dalam PILEG dan PILPRES Tahun 2019	Pengawasan	Tahun 2022	√	√	
40	Rakor Pengawasan Tahapan PILEG dan PILPRES Tahun 2019	Pengawasan	Tahun 2022	√	√	
41	Dokumen Rakernis Pemutahiran Data dan Verifikasi Syarat dukungan Calon Persorangan Tahun	Pengawasan	Tahun 2022	√	√	
Hasil dari setiap Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan dan Program pada tahapan Pemilu dan Pemilihan						
42	DPT Tahun 2020	Pengawasan	Tahun 2020	√	√	
43	Laporan Kampanye Tahun 2020	Pengawasan	Tahun 2020	√	√	
44	Hasil Pungut Hitung Tahun 2020	Pengawasan	Tahun 2020	√	√	
45	Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tahun 2022	Pengawasan	Tahun 2022	√	√	
Jumlah, Jenis dan Gambaran umum Pelanggaran yang dilaporkan serta Penindakannya						
46	Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pemilihan	Penyelesaian Sengketa	Tahun 2020	√	√	
47	Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019	Penanganan Pelanggaran	Tahun 2019	√	√	

48	Penanganan Pelanggaran Pemilihan 2020	Penanganan Pelanggaran	Tahun 2020	√	√	
49	Informasi Pemilu dan Pemilihan lain yang berkaitan dengan Pengawas Pemilu dan Pemilihan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan	Pengawasan	Tahun 2022	√	√	
Hak, Kewajiban, Kewenangan, Larangan dan sanksi yang berkaitan dengan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan						
50	Politik Uang	Hukum	Tahun 2020	√	√	
51	Politisasi Sara	Hukum	Tahun 2020	√	√	
52	Netralitas ASN	Hukum	Tahun 2020	√	√	
53	Pemilih yang diwakilkan	Hukum	Tahun 2020	√	√	
54	Hak dan Kewajiban	Hukum	Tahun 2020	√	√	
Prosedur dan sarana Partisipasi Publik dalam Pengawasan Pemilu dan Pemilihan						
55	Deklarasi Tokoh Adat Mitra Bawaslu	Pengawasan	Tahun 2020	√	√	
56	Randau Ruai Bawaslu	Pengawasan	Tahun 2020	√	√	
57	FGD Peran Strategi Hukum Adat dalam mencegah Politik Uang	Pengawasan	Tahun 2020	√	√	
58	Cegah Terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU)	Pengawasan	Tahun 2020	√	√	
59	Netralitas ASN Pada Pemilihan/Pemilu	Pengawasan	Tahun 2020	√	√	
INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA						

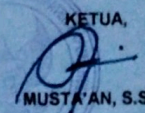
INFORMASI MENGENAI PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI						
	Informasi Hasil Penelitian					
60	Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019	Pengawasan	Tahun 2019	√	√	
61	Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2020	Pengawasan	Tahun 2020	√	√	
	Informasi Mengenai Pengawasan Pemilu					
62	Rekomendasi Bawaslu terhadap Perpanjangan Laporan Masyarakat Dalam Pindah Memilih	Pengawasan	Tahun 2019	√	√	
63	Hasil Pengawasan DPT Pemilu 2019	Pengawasan	Tahun 2019	√	√	
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN TERSEDIA SETIAP SAAT						
Barang Milik Negara (BMN)						
64	Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga mengenai Pengadaan Barang dan Jasa (Barang Milik Negara Tahun 2018)	Kesekretariatan	Tahun 2018	√	√	
65	Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga mengenai Pengadaan Barang dan Jasa (Barang Milik Negara Tahun 2019)	Kesekretariatan	Tahun 2019	√	√	
66	Kartu Inventaris Ruangan	Kesekretariatan	Tahun 2019	√	√	
67	Data Perbendaharaan atau inventaris barang milik negara (BMN)	Kesekretariatan	Tahun 2022	√	√	
Pinjam Pakai dengan Pemerintah Daerah						
68	Surat-surat perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Daerah Tahun 2018)	Kesekretariatan	Tahun 2018	√	√	

69	Surat-surat perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Daerah Tahun 2019)	Kesekretariatan	Tahun 2019	√	√	
70	Surat-surat perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Daerah Tahun 2020)	Kesekretariatan		□	□	
71	Surat-surat perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Daerah Tahun 2021)	Kesekretariatan		□	□	
72	Surat-surat perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Daerah Tahun 2022)	Kesekretariatan	Tahun 2022	√	√	
Informasi Mengenai Pengawasan Pemilu						
73	Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2015-2019	Kesekretariatan	Tahun 2015	√	√	
Informasi Mengenai Organisasi, Administrasi, dan Kepegawaian						
74	Data Statistik Kepegawaian	Kesekretariatan	Tahun 2022	√	√	
75	SOP Pedoman Pengelolaan Organisasi	Kesekretariatan	Tahun 2019	√	√	
76	SOP Pedoman Pengelolaan Administrasi	Kesekretariatan	Tahun 2022	√	√	
77	SOP Pedoman Kepegawaian	Kesekretariatan	Tahun 2014	√	√	
78	SOP Pengelolaan Keuangan	Kesekretariatan	Tahun 2019	√	√	
79	SOP Tata Cara Pertanggung jawaban Keuangan	Kesekretariatan	Tahun 2013	√	√	
80	Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024	Kesekretariatan	Tahun 2021	√	√	
81	Data Statistik Keuangan	Kesekretariatan	Tahun 2021	√	√	

82	Daftar informasi publik yang telah dimutakhirkan	Data dan Informasi	Tahun 2022	√	√	
Informasi khusus Pemilu dan Pemilihan lain						
83	Indek Kerawanan Pemilu (IKP)	Pengawasan	Tahun 2020	√	√	
84	Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2020	Pengawasan	Tahun 2020	√	√	
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN						
85	Memorandum atau Surat-Surat Antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan	Hukum	Tahun 2020	√	√	
86	Dokumen Pengawas Pemilu/Pemilihan	Pengawasan	Tahun 2019	√	√	
87	Penetapan Informasi yang di kecualikan	Hukum	Tahun 2018	√	√	
88	Dokumen Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan	Penanganan Pelanggaran	Tahun 2020	√	√	
89	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Parwas	SDMO	Tahun 2019	√	√	
90	Dokumen Status Laporan Temuan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	Penanganan Pelanggaran	Tahun 2020	√	√	
91	Duplik Atas Replik	Penanganan Pelanggaran	Tahun 2019	√	√	
92	Alat kerja Pengawasan	Pengawasan	Tahun 2019	√	√	
93	Dokumen Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan umum	Penanganan Pelanggaran	Tahun 2019	√	√	
94	Dokumen Dugaan Tindak Pidana Pemilu	Penanganan Pelanggaran	Tahun 2019	√	√	

95	Informasi yang dikecualikan	Hukum	Tahun 2019	√	√	
LAYANAN INFORMASI						
FORM ONLINE						
96	Permohonan Informasi	Data dan Informasi	Tahun 2021	√	√	
97	Permohonan Keberatan	Data dan Informasi	Tahun 2021	√	√	
FORM OFFLINE						
98	Permohonan Informasi Offline	Data dan Informasi	Tahun 2021	√	√	
99	Tanda Terima Informasi	Data dan Informasi	Tahun 2021	√	√	
100	Daftar Register Keberatan Informasi	Data dan Informasi	Tahun 2021	√	√	
101	Daftar Register Permohonan Informasi	Data dan Informasi	Tahun 2021	√	√	
PROSEDUR						
102	Hak dan Kewajiban Permohonan Informasi	Data dan Informasi	Tahun 2021	√	√	
103	Hak dan Kewajiban Bawaslu Dalam Pelayanan Informasi	Data dan Informasi	Tahun 2021	√	√	
104	Waktu Layanan	Data dan Informasi	Tahun 2021	√	√	
105	Biaya Layanan	Data dan Informasi	Tahun 2021	√	√	

106	Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi	Data dan Informasi	Tahun 2021	√	√	
107	Prosedur Permohonan Informasi	Data dan Informasi	Tahun 2021	√	√	
108	Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi	Data dan Informasi	Tahun 2021	√	√	
109	Prosedur Penerimaan Temuan/Laporan Pelanggaran	Data dan Informasi	Tahun 2021	√	√	
110	Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Publik	Data dan Informasi	Tahun 2021	√	√	
111	Prosedur Permintaan Informasi Pada Masa COVID-19	Data dan Informasi	Tahun 2021	√	√	
LAPORAN LAYANAN INFORMASI						
112	Ringkasan Layanan Informasi	Data dan Informasi	Tahun 2021	√	√	
113	Laporan Layanan Informasi	Data dan Informasi	Tahun 2021	√	√	
SARANA LAYANAN						
FAQ						

KETUA,

 MUSTAFAN, S.Sos